

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017, disusun berdasarkan Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 serta dengan mempertimbangkan isu-isu internasional, isu-isu nasional dan isu-isu daerah.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis dan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang disampaikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka telah dirumuskan 12 (dua belas) program unggulan daerah yang menjadi program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2012 – 2017. Adapun program unggulan tersebut yaitu :

1. Pengembangan *One Village One Product (OVOP)* dan koperasi komoditi
2. Penguatan *rural urban linkages*
3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
8. Peningkatan kualitas Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata
12. Pengendalian pemanfaatan ruang
13. Program SATAM EMAS.

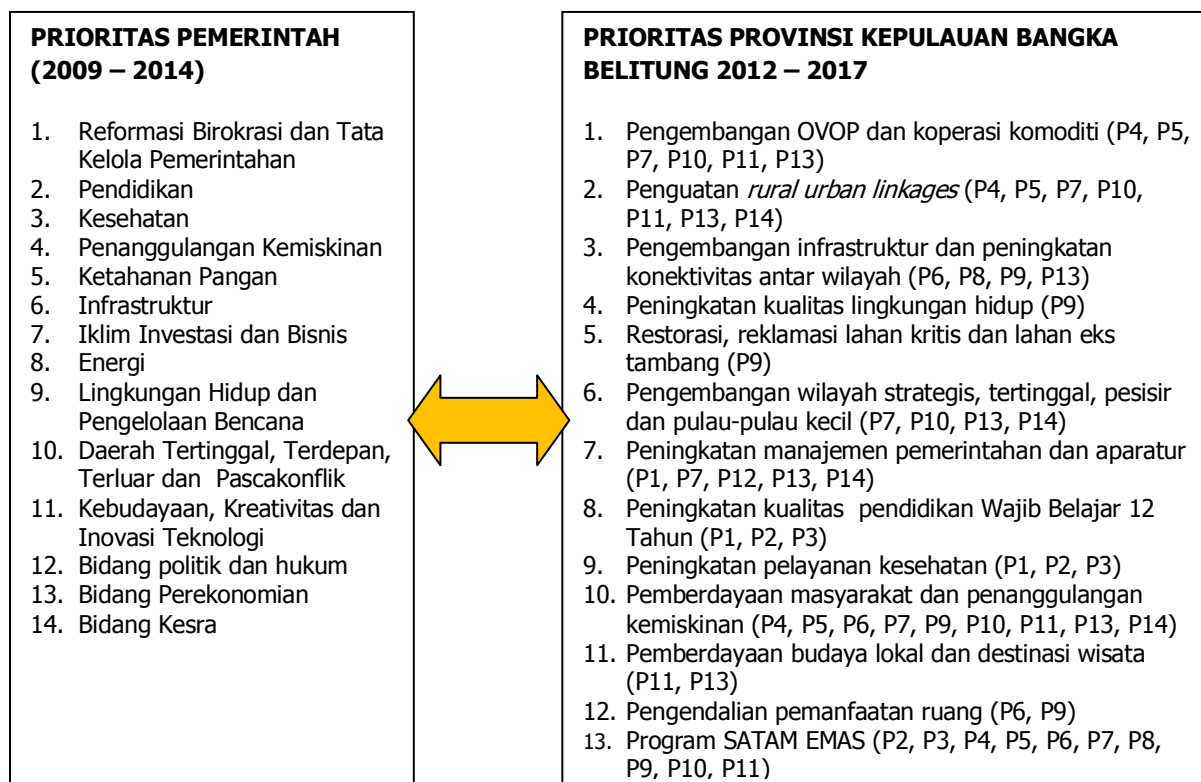
Keterkaitan program prioritas provinsi dengan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) diuraikan pada **Tabel 7.1**, sedangkan keterkaitan dengan prioritas pembangunan Nasional diuraikan pada **Gambar 7.1**.

Tabel 7.1
Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam Merespon Program MDGs

No.	Tujuan Pembangunan MGDs	Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017
(1)	(2)	(3)
1	Memberantas kemiskinan dan kelaparan	Pengembangan OVOP dan koperasi komoditi (PP1) Penguatan rural urban linkages (PP2) Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP10) Program SATAM EMAS (PP13)
2	Mencapai pendidikan dasar untuk semua	Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun (PP8) Program SATAM EMAS (PP13)
3	Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (PP10) Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata (PP11)
4	Menurunkan angka kematian anak	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9)
5	Meningkatkan kesehatan ibu	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9)
6	Mengendalikan HIV, AIDs, Malaria dan Penyakit menular lainnya	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (PP9)
7	Menjamin kelestarian lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup (PP4) Pengendalian pemanfaatan ruang (PP12) Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang (PP5) Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah (PP3) Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil (PP6) Program SATAM EMAS (PP13)
8	Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan	MDGs 8 memuat kewajiban yang harus dilakukan negara maju agar negara berkembang dapat mencapai tujuh goal MDGs.

Gambar 7.1

Implementasi INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional



Keterkaitan hubungan antara kebijakan umum, program pembangunan daerah, indikator kinerja, capaian kinerja kondisi awal dan kondisi akhir, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab diuraikan sebagaimana Tabel 7.2.

Tabel 7.2
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 1 : Pengembangan ekonomi kerakyatan								
1.	Menguatnya kapasitas Koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.	Mengembangkan kelembagaan Koperasi dan UMKM dan Kelembagaan ekonomi lainnya	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM (%)	N/A	75,00	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya jumlah Koperasi (Pedesaan dan Perkotaan) dan UMKM (unit)	Pedesaan= 305, perkotaan= 643	Pedesaan= 375, perkotaan= 678	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Jumlah Koperasi menangani Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Perdagangan, dan Pangan (unit)	Perikanan=22 %, perkebunan=28 %, pariwisata=2%, perdagangan= 188%, pangan=60%	Perikanan=32%, perkebunan=48 %, pariwisata=7%, perdagangan= 236%, pangan=85%	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Meningkatnya Jumlah Koperasi aktif (%)	0,78	0,80	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
				Diterbitkannya Sertifikat Halal untuk UMKM (produk)	-	50,00	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Meningkatnya persentase Badan Usaha Milik Desa yang aktif (%)	10,00	100,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perekonomian Pemerintah Daerah	jumlah kebijakan yang dihasilkan (kebijakan)	100,00	100 kebijakan bidang perekonomian	Perekonomian	Biro Ekonomi
			Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi (%)	50,00	90,00	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda dan Statistik
		Memperluas aksesibilitas permodalan melalui kredit usaha dan bantuan modal bagi masyarakat	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	N/A	75,00	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Tersalurkannya kredit dalam rangka pengembangan minapolitan (Milyar)	0,70	1,60	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan kapasitas produksi produk unggulan daerah melalui penerapan IPTEK dan Peningkatan prasarana sarana pendukung produksi	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah ekonomi kreatif berbasis media desain dan IPTEK yang dihasilkan (unit)	N/A	10,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya yang dihasilkan (unit)	N/A	10,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan Perikanan Tangkap	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)	1,00	3,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Perikanan Budidaya	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani pembudidaya ikan (cluster)	1,00	3,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Meningkatnya ragam kemasan KUMKM (jenis)	-	9,00	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas KUMKM

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi industri kecil dan menengah (%)	50,00	75,00	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Jumlah industri berbasis sumber daya alam yang terbangun (unit)	2,00	7,00	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi pertanian (%)	N/A	50,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	N/A	75,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang dan jasa, mengembangkan pasar dalam negeri serta kerjasama perdagangan	Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah (pelaku)	N/A	25,00	Penanaman Modal Daerah	BKPMD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Terciptanya pasar desa (unit)	2,00	50,00	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata	Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata (%)	N/A	75,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Tingkat produksi dan produktivitas hasil komoditas kelautan dan perikanan (%)	N/A	120,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah ketersediaan sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (pasar)	3,00	22,00	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas KUMKM
			Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Pelaksanaan kegiatan perdagangan yang terkendali dan terlindungi (desa)	42,00	50,00	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat penguatan institusi pasar dalam negeri (pasar)	-	7,00	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100,00	100,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat perluasan jejaring pengembangan pariwisata (%)	N/A	75,00	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatkan DBH di sektor pertambangan dalam pengembangan perekonomian di Babel	Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah (%)	N/A	75,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mengembangkan Program CSR/CD dalam mendukung perekonomian Bangka Belitung termasuk pengembangan pariwisata	Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Tingkat kelestarian lingkungan hidup kawasan usaha pertambangan (%)	N/A	75,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Mempersiapkan SDM sebagai syarat utama berkembangnya ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan kapasitas SDM	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	80,00	Pertanian, Kelautan Perikanan dan Kehutanan	Bakorluh
			Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	80,00	Pertanian, Kelautan Perikanan dan Kehutanan	Bakorluh
			Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Tingkat kinerja tenaga penyuluh pertanian lapangan (%)	N/A	80,00	Pertanian, Kelautan Perikanan dan Kehutanan	Bakorluh
			Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	tingkat produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM (%)	N/A	110,00	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi ketentuan <i>good corporate governance (unit)</i>	-	1,00	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas KUMKM

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	N/A	0,50	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
3	Berkembangnya sentra-sentra produk unggulan daerah	Membentuk One Village One Product (OVOP)	Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Tingkat Perkembangan sentra-sentra industri potensial (unit)	-	2,00	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Penataan Struktur Industri	Tingkat Daya Saing Produk-produk industri kecil dan menengah (tinggi/menengah/rendah)	rendah	tinggi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Mengembangkan komoditas unggulan daerah sebagai ikon produk pertanian provinsi kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan (%)	60,00	100,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Mengembangkan desa mandiri pangan.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat pendapatan petani (%)	rendah	tinggi	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan kawasan integrasi ternak dan tanaman.	Peningkatan Produksi Pertanian	Terbentuknya kawasanPengembangan integrasi perkebunan sawit - sapi (kawasan)	-	4,00	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Mengembangkan Desa Mandiri Energi dalam rangka penyediaan energi di desa terpencil dan desa-desa wisata	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Tersedianya sumberdaya energi dalam mendukung kebutuhan pasokan energi di babel	PLTU 2x30 MW, JTM, JTR dan 1 Perda	JTM 1.101,9 Kms, JTR 1.234,1 kms dan PLTU 193MW dan 1 Pergub	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Menyediakan data dan informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah (sektor)	-	5,00	Penanaman Modal Daerah	BKPM
3	Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran	Fasilitasi pengembangan usaha penangkapan ikan, pembudidaya ikan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan skala kecil se-Babel	Pengembangan Perikanan Tangkap	Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap (cluster)	1,00	3,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya daya beli masyarakat			Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok tani pembudidaya ikan (cluster)	1,00	3,00	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat.	Peningkatan aksesibilitas pangan baik akses pangan perdesaan dan perkotaan	Peningkatan Ketahanan Pangan	Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (%)	12,80	35,00	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		Memanfaatkan potensi sumber daya hutan	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan (kasus)	N/A	5,00	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Meningkatkan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi dan penggunaan energi baru terbarukan	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	tersedianya 1 laporan DED PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil	PLTHybrid 1 unit, PLTS Terpusat 1 unit, EBT 5 Paket	1 laporan DED PLTMH, 10 Unit PLT Hibrid, 10 unit PLTS terpusat dan 300 unit PLTS tersebar, PLTU 181 MW dan 1.000 unit PJU di daerah terpencil	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan ruang usaha kecil dan menengah dalam mendukung konversi Mitan ke LPG 3 Kg	Pembinaan dan Pengusahaan Perusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Tingkat kelestarian lingkungan hidup kawasan usaha pertambangan (%)	N/A	75,00	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
Misi 2 : Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)								
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (di atas rata-rata nasional)	Mempercepat derajat kesehatan masyarakat	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	Menurunnya kesakitan malaria per 1000 penduduk	< 3	< 1	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Menurunnya kesakitan DBD per 100.000 penduduk	< 53	< 46		
				Menurunnya Prevalensi HIV (persentase kasus terhadap penduduk beresiko)	< 10	< 10		
				Meningkatnya kasus baru (BTA positif) yang disembuhkan (persentase)	89,00	90,00		

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya rumah sehat yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase)	75,00	90,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya penduduk yang mengakses air minum berkualitas (persentase)	60,00	74,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota	100,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (persentase)	60,00	70,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Meningkatnya Kab/Kota yang memiliki posyandu purnama mandiri (Persentase)	28,00	40,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Menurunnya kematian ibu per kelahiran hidup	35,00	27,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan & RSJ

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Persentase)	96,5	98,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita yang ditimbang berat badan	55,00	78,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Meningkatnya balita gizi buruk yang mendapat perawatan (Persen)	100,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)	42,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Meningkatnya cakupan tempat pengolahan makanan yang Pemenuhan syarat kesehatan (Persentase)	-	85,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak	Menurunnya kematian ibu per kelahiran hidup	35,00	27,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Menurunnya Angka kematian bayi	35,00	28,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang prima, terjangkau dan merata sesuai standar	Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya fasilitas RS yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS) Persentase)	70,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan & RSJ
			Progran Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Meningkatnya sarana prasarana RS sesuai standar (Persentase)	50,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan & RSJ
			Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1	75,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes	Meningkatnya Cakupan pelayanan Laboratorium	70,00	95,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar & rujukan yang melaksanakan pelayanan sesuai standar	100,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan & RSJ
		Meningkatkan layanan pendidikan disemua jenjang pada masyarakat	PAUD	Meningkatnya APK PAUD	0,19	0,50	Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya APK SD Sederajat	1,16	1,16	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya APM SD Sederajat	0,95	0,97	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya APK SMP Sederajat	0,92	0,98	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya APM SMP Sederajat	0,64	0,84	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya APK Pendidikan Menengah	0,77	0,98	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Pendidikan Non Formal	Menurunnya Buta Aksara	0,04	0,03	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Warga Belajar Paket A, B dan C	8.229,00	20.000,00		
		Mengembangkan budaya membaca dan menulis, serta pembinaan perpustakaan	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif	0,60	1,00	Perpustakaan	BPAP
		Meningkatkan SDM Kearsipan, Sadar Arsip dan Pelayanan Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi	Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase SDM kearsipan yang berkualitas (%)	70,00%	100,00%	Kearsipan	BPAP

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Memberikan beras gratis kepada masyarakat miskin	Raskintis	Persentase penduduk miskin yang menerima Raskin	1,00	1,00	Kemiskinan	BPMPD
		Meningkatkan pembiayaan dan kualitas Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)	Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Meningkatnya penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (Persentase)	70,00	100,00	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM	Persentase Koperasi dan UMKM aktif	0,70	1,00	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	KUMKM
		Penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergisitas semua sektor	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan	Persentase kemiskinan	5,61%	4,2%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dengan dokumen RPJMD	60,00%	90,00%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan dan memanfaatkan SDA Pedesaan dan Sistem Pengembangan ekonomi Wilayah Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya Permukiman dalam Kawasan Transmigrasi sebagai Tempat tinggal dan tempat berusaha Yang layak	-	600 KK	Ketransmigrasi an	Disnaker
		Memberdayakan masyarakat Transmigrasi dan mengembangkan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Berkembangnya Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yg Terintegrasi Dalam Satu Kesatuan Sistem Pengembangan Ekonomi Wilayah Yang Berdaya Saing	0,00%	60,00%	Ketransmigrasi an	Disnaker
2	Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, Peningkatan kualitas pemerintahan desa/ kelurahan dan Penguatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/kelurahan dan Keuangan Desa/kelurahan	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan yang ada di desa dengan dokumen perencanaan yang ada di kabupaten/kota	50,00%	100,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil melaksanakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (JUKNIS, JUKLAK, dan lain-lain)	50,00%	100,00%		
				Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil melaksanakan administrasi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku	50,00%	100,00%		
			Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga yang ada di desa/kelurahan	15,00%	50,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
			Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa/kelurahan	Prosentase keterlibatan masyarakat dalam membangun desa	50,00%	100,00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bencana Bidang Kesehatan	Meningkatnya Kab/Kota dengan kesiapsiagaan penanggulangan bencana bidang kesehatan	90,00%	100,00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Tingkat keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	60,36	69,95	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPAKB
			Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00%	100,00%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPPAKB

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda yang mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pembangunan pariwisata daerah	Pembinaan Generasi Muda	Terwujudnya peningkatan pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan	452 pemuda	1798 pemuda	Kepemudaan dan olahraga	Dispora
		Memassalkan olahraga dan pembinaan prestasi olah raga	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada even POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	15,00	≤ 15	Kepemudaan dan olahraga	Dispora
		Meningkatkan kualitas budaya berbasis agama	Bantuan terhadap tempat-tempat ibadah	Meningkatnya sarana ibadah yang dibantu terhadap jumlah proposal	30,00%	90,00%	Agama	Biro Kesra

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Berbasis Masyarakat pada setiap jenjang Pendidikan	Manajemen Layanan Pendidikan	Lembaga PAUD menerapkan MPMBS	100,00%	100,00%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				SD/MI/SDLB menerapkan MPMBS	100,00%	100,00%		
				SMP/MTS/SMPLB Menerapkan MPMBS	100,00%	100,00%		
				SMA/SMK/MA/SMALB menerapkan MPMBS	100,00%	100,00%		
		Meningkatkan Peran Masyarakat di daerah tujuan Wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya desa yang difasilitasi dan dikembangkan sebagai Desa Wisata (DESA)	31,00	90,00	Pariwisata	Budpar
		Meningkatkan kualitas perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan cagar budaya dan permuseuman	Pengembangan Nilai-nilai Budaya	Meningkatnya cagar budaya dan museum yang dilestarikan (Persen)	2,00	4,00	Kebudayaan	Budpar

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan kreatifitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film	Pembinaan Seni dan Perfilman	Meningkatnya kreatifitas karya seni dan perfilman (Persen)	25,00	50,00	Kebudayaan	Budpar
		Meningkatkan kesadaran dan pemahaman multikultur serta kearifan lokal	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Adat (Persen)	25,00	50,00	Kebudayaan	Budpar
		Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Sejarah serta Penguatan jati Diri dan Karakter Bangsa	Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Meningkatnya pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya	20,00	50,00	Kebudayaan	Budpar
		Meningkatkan ketahanan dan apresiasi budaya	Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Meningkatnya pemberdayaan komunitas pemerhati sejarah dan budaya	20,00	50,00	Kebudayaan	Budpar
3	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka	Meningkatkan kualitas pendidikan, baik mutu pendidikan, tenaga pendidik, sarana prasarana maupun sistem dan manajemen pendidikan.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya Kelulusan SD/MI	0,99	1,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Belitung.							
				Menurunnya Mengulang SD/MI	0,09	4.0%		
				Meningkatnya Kelulusan SMP/MTs	0,96	1,00		
				Menurunnya Mengulang SMP/MTs	0,01	0,00		
			Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya Kelulusan SMA/MA	0,99	1,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Kelulusan SMK	0,99	1,00		
				Menurunnya Mengulang Pendidikan Menengah	0,01	0,00		
			Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rasio peningkatan kemampuan pegawai pada jabatan struktural dan teknis fungsional terhadap jumlah pegawai se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	838,00	1.960,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Bandiklat

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rasio peningkatan kemampuan pegawai pada jabatan struktural dan teknis fungsional terhadap jumlah pegawai se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	228,00	1.245,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Bandiklat, BKD
		Meningkatkan alokasi beasiswa semua jenjang pendidikan bagi pelajar/mahasiswa kurang mampu	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Meningkatnya DO SD/MI	0,00	0,00	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Meningkatnya Angka Melanjutkan SD/MI	0,96	1,00		
				Menurunnya DO SMP/MTs	0,01	0,00		
				Meningkatnya Angka Melanjutkan SMP/MTs	0,94	1,00		
			Pendidikan Menengah dan Tinggi	Meningkatnya DO Pendidikan Menengah	0,02	0,01	Pendidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan pemenuhan terhadap kualitas tenaga kesehatan dengan rasio yang seimbang dengan jumlah masyarakat	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Meningkatnya Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	6,1	9,7	Kesehatan	Dinas Kesehatan & BKD Pemprov
			Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	26,7	34,3		
				Meningkatnya Rasio perawat per 100.000 penduduk	245,80	337,6		
				Meningkatnya Rasio bidan per 100.000 penduduk	70,7	96,00		
4	Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.	Meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS	Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,20	0,50	Sosial/Kemiskinan	Dinkesos
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,20	0,50	Sosial/Kemiskinan	Dinkesos

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Prosentase PMKS/PSKS yang menerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial.	0,20	0,50	Sosial/Kemiskinan	Dinkesos
		Meningkatkan kewirausahaan dan kelembagaan koperasi dan UMKM	Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Persentase Koperasi aktif	0,70	1,00	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	KUMKM
		Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Mencetak TK dan Wirausaha baru yang berdaya saing	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas TK	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas TK	0,00%	60,00%	Tenaga kerja	Disnaker
		Memperluas Penciptaan Kesempatan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun d luar negeri	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Pelayanan Penempatan TK dan Perluasan Kesempatan Kerja	0,00%	75,00%	Tenaga Kerja	Disnaker

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan Pengelolaan Iklim Kerja yang Kondusif Melalui Hubungan Industrial yang harmonis.	Pengembangan HI dan Jamsostek	Terwujudnya HI yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Industrial.	0,00%	60,00%	Tenaga Kerja	Disnaker
		Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pengawasan Tenaga Kerja, K3, Serta Penegakan Hukum.	Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Penerapan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di tempat kerja	0,00%	60,00%	Tenaga Kerja	Disnaker
		Revitalisasi Balai Latihan Kerja Industri	Revitalisasi BLKI	Prosentase infrastruktur yang terbangun	0,15	0,85	Tenaga Kerja	Disnaker
		Pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda	Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terwujudnya pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwirausahaan	452 pemuda	1798 pemuda	Kepemudaan dan olahraga	Dispora
		Meningkatkan Pendidikan kewirausahaan di SMK dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan Menengah dan Tinggi	Sekolah menerapkan pendidikan kewirausahaan	1,00	1,00	Kependidikan	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Peserta Kursus Bersertifikat	4.780,00	5.370,00	Kependidikan	Dinas Pendidikan
				Menurunnya Pengangguran Terlatih	0,15	0,19		
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang								
1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.	Mengendalikan pencemaran lingkungan untuk mengurangi tingkat pencemaran	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terpantaunya status mutu air	2 unit	7 unit	Lingkungan Hidup	BLHD
				Meningkatnya kualitas dan kapasitas serta jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	8 org	18 org	Lingkungan Hidup	BLHD
				Tersosialisasinya Gerakan Sadar Lingkungan pada masyarakat	240 org	1500 org	Lingkungan Hidup	BLHD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Adanya Tindakan lanjut Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	0 kasus	18 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbinanya dan terpantaunya Pelaksanaan RKL dan RPL	6 keg	50 keg	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbinanya dan Terawasinya Komisi Penilai AMDAL	6 kab/kota	7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terpantaunya kegiatan usaha wajib AMDAL	18 keg/usaha	45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terinventarisasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	0 dok	1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
		Mengelola sumber daya alam untuk mengendalikan sampah dan lahan perkotaan	Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan	0 kab/kota	7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
				Cakupan pelayanan persampahan	35% TPA Regional yang belum mendapat penanganan (sharing pemerintah pusat)	3 TPA Regional di Prov.Kep.Babel	Lingkungan Hidup	BLHD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan Pengendalian Polusi	Terpantaunya status mutu udara	1 kota	7 kota	Lingkungan Hidup	BLHD
		Mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan berkonsep pembangunan berkelanjutan untuk Peningkatan akses dan informasi SDA dan LH	Peningkatan kualitas serta akses informasi SDA dan LH	Terbangunnya Jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	0 jaringan	8 jaringan	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terinventarisasinya Status Lingkungan Hidup Daerah	1 dok	1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanaman dan hutan alam	terbentuknya 1 unit KPHP model dibangka tengah	terbentuknya dan beroprasiya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pembangunan	1 dok	2 dok	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Mengkoordinasikan perencanaan, Pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokalitas untuk Pengendalian dampak lingkungan	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas bumi dan Air Tanah	Tersedianya laporan pelaksanaan reklamasi dan pasca Tambang sebanyak 75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiatanPeningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	1 PERDA Mineral dan 2 kegiatan peningkatan kapasitas SDM di bidang Pertambangan dan Energi	75 laporan, 1PERGUB Mineral, 65 Pelaku tambangyang dibina dan 19 kegiatanPeningkatan kapasitas SDM di bidang pertambangan dan energi.	Energi dan Sumberdaya Mineral	Distamben
			Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Terkoordinirnya kegiatan penambangan di provinsi kepulauan bangka belitung	126 laporan pengawasan terhadap pelaku tambang	200 laporan pengawasan terhadap pelaku tambang	Energi dan Sumberdaya Mineral	Distamben

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Terencanannya pengelolaan DAS terpadu	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS terpadu ada 1 unit satuan wilayah pengelolaan (SWP) DAS Ajang Mabat-Macung	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejateraan masyarakat di hulu dan hilir	Kehutanan	Dishut
				Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas dan reklamasi pada kawasan hutan	Terbentuknya tim pengendali rehabilitasi dan reklamasi hutan provinsi kep. Babel	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Kehutanan	Dishut

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatkan pemanfaatan lahan agar menjadi kawasan produktif dan ekonomis untuk melindungi kerusakan SDA	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terjaminnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Keputusan menteri hehutanna Nomor SK.357/Menhut -II/2004 tentang penunjukan Kawasan hutan wilaya provinsi kepulauan bangka belitung seluas 657,510 Ha dan hasil penelitian tim terpadu penyelesaian subtansi kehutanan dalam rangka penyusunan RTRWP.	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapt dilaksanakan secara optimal	Kehutanan	Dishut

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mempercepat rehabilitasi lahan kritis di darat dan laut disertai dengan pengawasan yang ketat untuk Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan	Penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (Honoror)	Terlasananya penangan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)	Kehutanan	Dishut
3	Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai lokal untuk mencegah dampak negatif lingkungan akibat Pemanfaatan ruang	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersusunnya dokumen perencanaan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	-	Perda RTRW dan Perda RTR Kawasan Strategis	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pengelolaan ruang terbuka hijau	Tingkat kualitas lingkungan dalam rangka pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan terpadu	0 KSP (0%)	14 KSP (30%)	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau di Prov. Kep. Babel	0 kab/kota	7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
			Perencanaan Tata Ruang	Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Fasilitas Percepatan Legislasi RTRW Kab/Kota	Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan untuk review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Pekerjaan Umum	Dinas PU

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemanfaatan Ruang	Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat	-	Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Prov. Kep. Bangka Belitung	5 PPNS Prov. Kep. Babel/Kab/ Kota	40 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggara n PR, Peralatan pendukung PPNS dan 30 Kasus per Kab/Kota	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Juta Ha)	1.000 Ha	400 Ha	Kelautan dan Perikanan	DKP

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Jumlah Pulau-Pulau Kecil termasuk Pulau Kecil Terluar yang dikelola (Pulau)	3 pulau	12 pulau		
Misi 4 : Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh								
1	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan	Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan aksesibilitas serta mendukung pengembangan pariwisata daerah yang berdaya saing sebagai pondasi pengembangan ekonomi wilayah.	Perencanaan dan Perencanaan dan pembangunan infrastruktur perdesaaan	Meningkatnya infrastruktur di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil.	70,00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil	70,00%		Distamben	

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi, layanan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat	Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya infrastruktur wilayah	0,00%	70,00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Meningkatkan pemenuhan secara bertahap transportasi antarpulau untuk meningkatkan transportasi barang dan orang serta juga mendukung perkembangan pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya transportasi laut antar pulau di Bangka Belitung	15,00%	70,00%	Perhubungan	dinas Perhubungan
2	Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat	Melakukan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Infrastruktur melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta	4 kerjasama	4 Kerjasama	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	tumbuh.							
		Mengembangkan Pangkalpinang sebagai daerah Metro	Perencanaan dan Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya Pangkalpinang sebagai kota Metro pada 2017	persiapan	terwujud	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Mempercepat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/kota	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Kebijakan Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang tersebar di kabupaten/ kota.	2,00	7 kebijakan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik
		Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di Tg. Berikat (Bangka Tengah) dan Tg. Batu (Belitung)	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terwujudnya KEK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	tahapan proses penetapan kawasan	2 unit	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik
		Menetapkan dan mengembangkan Kawasan Industri untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di setiap kabupaten / kota	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	beroperasionalnya kawasan industri di kabupaten/kota	1 kawasan industri	7 kawasan industri	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Melaksanakan Program MP3EI diwilayah Sumatera untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya roadmap dukungan Prov. Kep. Bangka Belitung dalam pelaksanaan MP3EI Koridor Sumatera	n/a	1 unit tk provinsi; 7 unit tk kab/kota	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik
			pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan energi	n/a	70,00%		Distamben
			Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terpenuhinya prasarana jalan	n/a	75,00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan	30,00%	60,00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara, dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan Negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	terpenuhinya secara bertahap infrastruktur perhubungan	30,00%	60,00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Meningkatkan Status Bandara Depati Amir menjadi Bandara Internasional Paling lambat tahun 2017 untuk mendukung perkembangan pariwisata dan perdagangan.	Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Peningkatan status bandara Depati Amir	Bandara regional	Bandara internasional	Perhubungan	Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Mengembangkan Tanjung Ular dan Tanjung Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai upaya mendukung pengembangan Kawasan Perhatian Investasi.	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya Tg. Ular dan Tg. Kalian (Muntok - Bangka Barat) sebagai kawasan industri baru	Merupakan KPI	Pusat Industri dan Investasi	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik
		Melakukan Rintisan Pengembangan Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan) untuk meningkatkan daya saing wilayah.	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Berkembangnya Trans Bangka Belitung (Sumatera – Bangka Belitung – Kalimantan).	Jalur Trans Babel masih belum lancar	Lancarnya arus barang dan penumpang melalui Trans Babel	Perencanaan Pembangunan	Bappeda dan Statistik
		Mengembangkan Desa-desa pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata	Terwujudnya desa wisata	1 desa wisata	10 desa wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 5 : Terwujudnya good governance dalam rangka mencapai clean government								
		Meningkatkan pelayanan publik yang prima, akuntabel, dan transparan sebagai upaya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	n/a	95,00	Pemerintahan Umum	Biro Umum dan Perlengkapan, Kantor Perwakilan, Biro Pemerintahan
		Melaksanakan peraturan kepegawaian secara tegas dengan menerapkan sistem "reward and punishment"	Pendidikan Kedinasan	rasio jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah aparatur	n/a	95,00	Kepegawaian	Badan Diklat, BKD
			Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	tingkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur	n/a	90,00	Kepegawaian	Badan Diklat, BKD
				tingkat kesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan	n/a	90,00	Kepegawaian	
			Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	tertib administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi	n/a	90,00	Kepegawaian	Badan Diklat, BKD

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				tingkat kemantapan penerapan sistem pengembangan karier pegawai	n/a	90,00	Kepegawaian	
			Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	menurunnya tingkat kriminalitas	2,70	10,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				Meningkatnya penguatan pelayanan dan bantuan hukum	0,00%	80,00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
				Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	0,00%	80,00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Satpol PP

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
		Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Penataan Peraturan Perundang-undangan	75,00	100,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan yang baik, serta meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan kecamatan, desa/kelurahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	60,00	100,00	Pemerintahan Umum	Biro Pemerintahan
			Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya harmonisasi penyelenggaraan otonomi daerah	75,00	90,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kep. Babel dalam struktur yang rasional, efektif, dan efisien.	42 SKPD belum tertata	42 SKPD belum tertata	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
			Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Sinkronnya penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penataan kelembagaan SKPD berjalan sendiri - sendiri	Penataan kelembagaan SKPD	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Nomenklatur, struktur kewenangan, dan tupoksi SKPD rasional, efektif, dan efisien	sistem pengelolaan belum maksimal	seluruh SKPD menerapkan manajemen	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
			Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penempatan pejabat sesuai dengan hasil analisa jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan analisa beban kerja.	penempatan pejabat belum sesuai	penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	kuantitas dan kualitas pelayanan publik meningkat	SOP dan SPM belum disusun	Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
			Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan rangka penguatan reformasi birokrasi	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	Nilai LAKIP masih C	Nilai LAKIP minimal B	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi

No	Sasaran	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Penguatan Peraturan Daerah dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat	Pelaksanaan Legislasi Daerah (Prolegda)	Skala kepuasan masyarakat (skala 1-4)	2,10	3,00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum, Sekretariat Dewan
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	WDP	WTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD, Inspektorat, Biro Pemerintahan